



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LKjIP  
2024

**BerAKHLAK**  bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2024.

LKjIP Perangkat Daerah merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian sasaran saat ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada masa yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip *good governance*.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



**Kepala Dinas**  
**Drs. ANDI AMRAN, M.Si**

Watampone, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pntu

Drs. ANDI AMRAN, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP 19681122 198908 1 001

---

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. UMUM .....	1
B. ORGANISASI .....	2
C. ISU STRATEGIS .....	5
D. ASPEK STRATEGIS .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. TUJUAN DAN SASARAN .....	8
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	10
D. PERJANJIAN KINERJA .....	11
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	13
B. REALISASI ANGGARAN .....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
A. SIMPULAN UMUM .....	34
B. KENDALA DAN UPAYA MENGATASI .....	35

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. UMUM

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat

kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

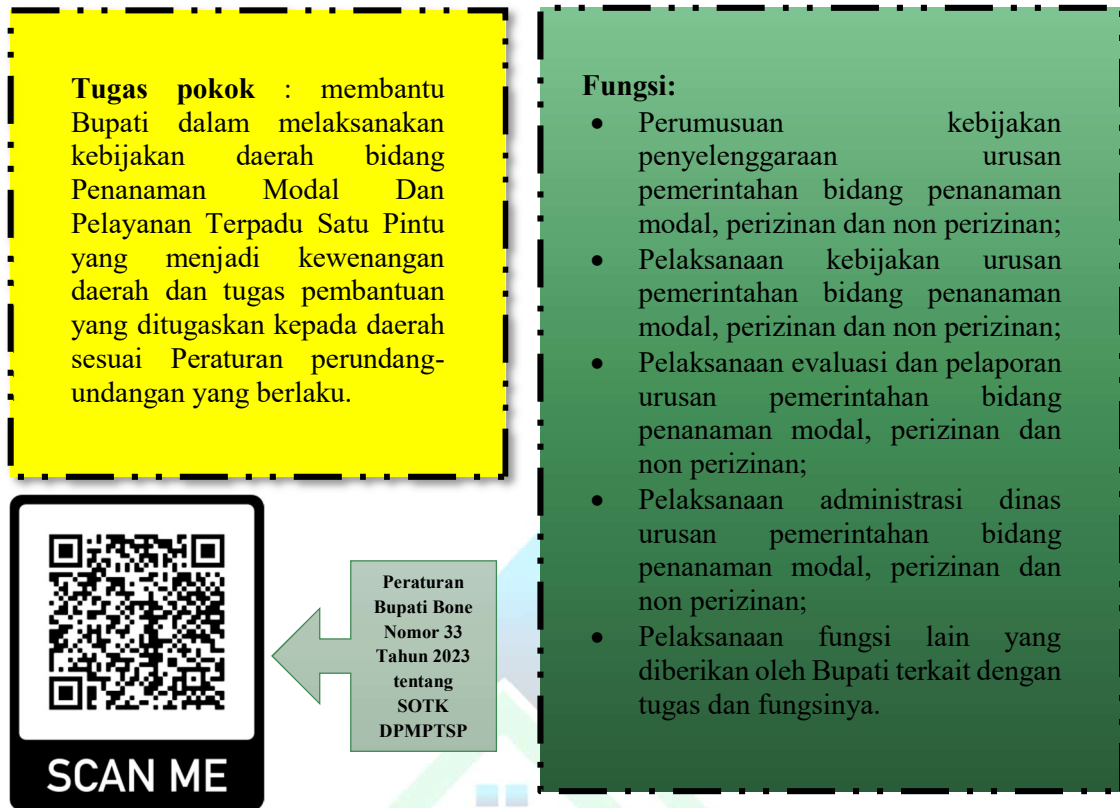
LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **B. ORGANISASI**

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bone tahun 2016 , tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

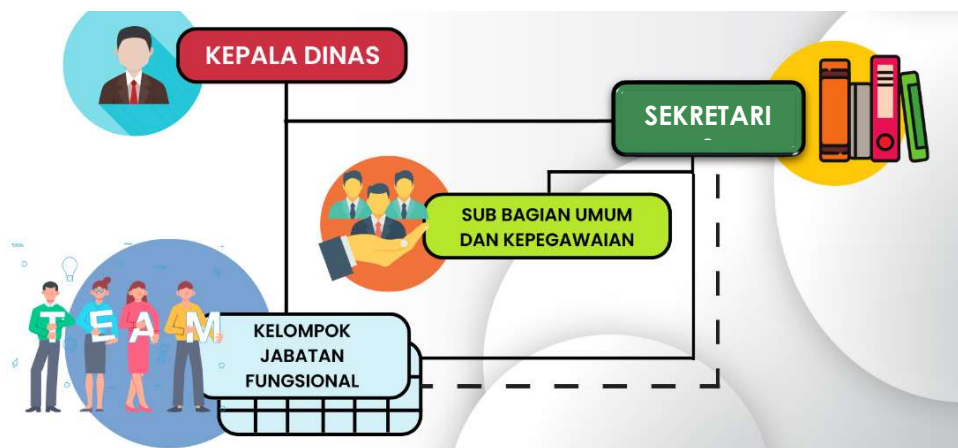


Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :



Untuk lebih jelas dari susunan organisasi dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone sebagai berikut :

Gambar 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Sumber data : PERBUP SOTK DPMPTSP Nomor 33 Tahun 2023

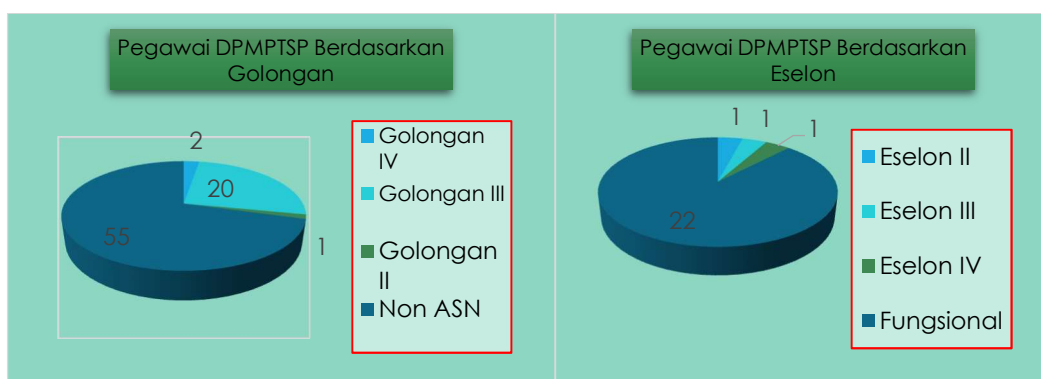
Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimiliki yang merupakan elemen penting dalam menggerakkan organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Susunan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, golongan dan eselon sebagai berikut :

Gambar 1.2  
Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber data: Dokumen Data Umum Kepegawaian DPMPTSP

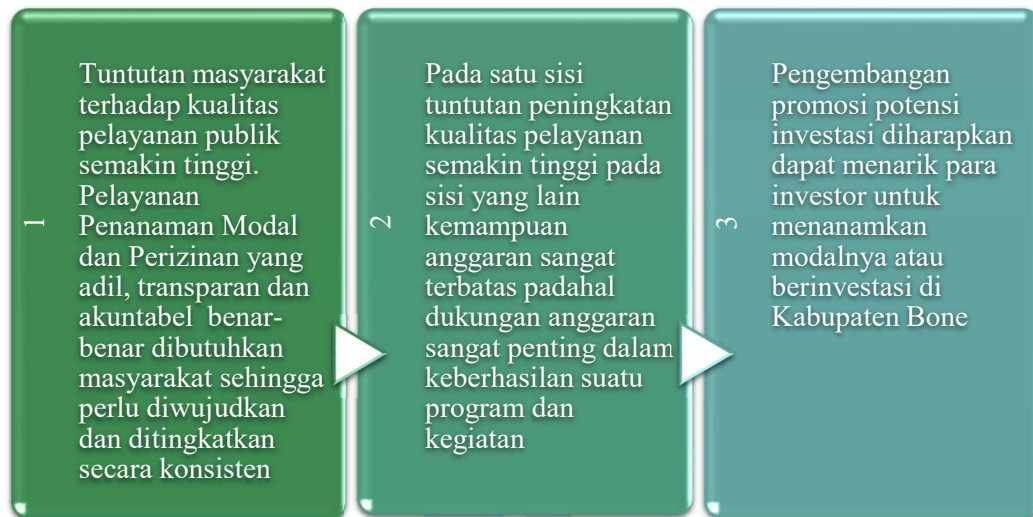
Gambar 1.3  
Diagram Pegawai berdasarkan Golongan dan Eselon



Sumber data: Dokumen Data Umum Kepegawaian DPMPTSP

### C. ISU STRATEGIS

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam perencanaan strategis 2024-2026 harus mempertimbangkan dan melihat isu strategis yang ada antara lain:



Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Semua izin diharapkan didukung dengan SIM Perizinan yang komprehensif;
- Semua jenis perizinan yang ditangani sudah dinaungi payung hukum (Perda, Perwal, Perka, dsb) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Investasi di Kabupaten Bone meningkat, terciptanya lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone menjadi meningkat;
- Didukung sarana dan prasarana yang layak, memadai dan memudahkan bagi kaum Disabilitas khususnya;
- Jumlah SDM yang ideal sesuai Analisis Jabatan 72 (Tujuh Puluh Dua)



---

#### D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Kabupaten Bone yang didasarkan pada terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 September 2024 dan telah diresmikan secara nasional serentak pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 dengan tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif” di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan. Terbentuknya MPPD ini merupakan wujud upaya Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia dengan berfokus pada transformasi, inovasi dan inklusivitas. Keberadaan MPPD ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap layanan publik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone berhasil meraih terbaik kedua dalam tahapan penilaian SSIC tahun 2024 dengan judul proposal “Industri Pengolahan Jagung Pakan Ternak”. Kegiatan SSIC 2024 ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan akan pentingnya mempersiapkan proyek investasi yang ada di daerah agar dapat dipromosikan dengan baik ke Investor luar dan dalam negeri. Sebab, Kabupaten/Kota pemenang SSIC 2024 akan diikutsertakan dalam kegiatan South Sulawesi Investment Forum (SSIF) 2024 untuk dihubungkan dan dipromosikan secara langsung ke *potential investor* dalam dan luar negeri untuk menjaring dana investasi yang masuk ke daerah Sulawesi Selatan. Dari kegiatan SSIC 2024 ini dapat memperoleh proyek investasi strategis terbaik di Sulawesi Selatan yang ke depannya akan dipromosikan secara massive, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tapi juga Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan di berbagai forum investasi dan luar negeri. Selengkapnya terkait kegiatan IPRO dapat diakses pada QR Code berikut :



LAPORAN  
IPRO 2024



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bone 2024-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD selama 3 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan arah kebijakan pembangunan :

***“Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian local yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif regional, nasional dan internasional. Perekonomian berkembang dengan baik dengan sistem ekonomi yang kuat dan mandiri. Hal ini ditunjang oleh jaringan pasar yang kuat dan stabil, serta partisipasi masyarakat Bone yang tinggi dalam dunia usaha, produksi dan jasa. Sistem perekonomian yang berjalan mampu menciptakan persaingan yang sehat dan produktif, serta mampu berjalan dengan adil dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”.***

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, prioritas pembangunan disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah :

1. Tujuan kesatu : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Baik
  - Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
  - Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif
2. Tujuan kedua : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif
  - Sasaran 4 : Meningkatnya Perkonomian Daerah

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, maka terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Penanaman Modal yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatkan Tata Kelola selaku Institusi Pelayanan Publik yang dilakukan secara bertahap terkait : - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; - Pengelolaan SDM - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik Mal Pelayanan Publik secara menyeluruh terkait : - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; - Pengelolaan SDM - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kemudahan Proses Pelayanan Perizinan	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan	Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Penanaman Modal
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi / Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Mendorong Terwujudnya Iklim Investasi Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan Iklim Investasi yang baik
			Penyiapan Dokumen Data Potensi sumberdaya serta sarana prasarana daerah terkait investasi penanaman modal
			Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal

Sumber Data : Dokumen Renstra 2024 – 2026



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Indikator Kinerja Utama** adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun		
			2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB (70-80)	A (>80-90)	A (>80-90)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	92	93
3	Meningkatnya Daya Tarik Investasi / Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN dan PMA	350 M	375 M	400 M

Sumber data : Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2024



#### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 4.426.638.272
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 135.933.450
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN	350 Milyar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 22.291.500
			Program Promosi Penanaman Modal	Rp 136.034.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 592.730.000
Jumlah				<b>Rp 5.313.627.222</b>

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan 2024



## E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisa terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
>100 %	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \% \leq x < 110\%$	Tercapai / Berhasil
$60 \% \leq x < 90 \%$	Cukup Tercapai / Cukup berhasil
$x < 60 \%$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase target capaian indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan / sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone meliputi :

**Tabel 3.1**

#### ***Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2024***

<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatnya Daya Tarik Investasi / Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai Investasi PMDN dan PMA

*Sumber data: Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2024-2026*

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Formulasi Perhitungan	Capaian 2024	Keterangan
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB (70-80)	A (80,95)	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	100%	Tercapai / Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90)	A (92,841)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100%	Tercapai / Berhasil
Meningkatnya Daya Tarik Investasi / Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai Investasi PMDN dan PMA	350 M	873.912.224.471	$\frac{\text{Realisasi Investasi 2024}}{\text{Realisasi Investasi 2023}} \times 100\%$	250%	Tercapai / Berhasil
<b>Rata-rata</b>					<b>116%</b>	<b>Tercapai / Berhasil</b>

Sumber data : Evaluasi RENJA tahun 2024

Berdasarkan data diatas rata rata capaian kinerja 116% dengan kategori pencapaian kinerja Melampaui Target.



BUKTI  
DUKUNG  
CAPAIAN  
IKU 2024  
DPMPSTSP  
KAB. BONE

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026. Adapun realisasi dan Capaian Kinerja DPMPTSP apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal 2022	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2021	2023	2024	2021	2023	2024
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A (80,57)		BB (76,70)	A (80,95)		100 %	100 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (88,563)		A (89,633)	A 92,841		100 %	100 %
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	2.300.998.887.802		908.599.254.656	873.912.224.471		227 %	250 %

Sumber Data : Evaluasi Renja Tahun 2022 - 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut :

### Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Realisasi kinerja Tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan pada tahun 2022 ke 2023 dengan Skor 80.57 (A) menjadi 76.70 (BB) , kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan skor menjadi 80.95 dengan predikat A.

### Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi kinerja Tahun 2022 – 2024 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 dengan nilai A (88.563), 2023 dengan Nilai A (89.633), kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 92.841 dengan predikat A.

### Nilai PMA/PMDN (Milyar)

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan drastis dari tahun 2022 sebesar Rp. 2.300.998.887.802 menjadi Rp. 908.599.254.656 pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 873.912.224.471.



### 3. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target RENSTRA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 – 2026 seperti dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target**  
**RENSTRA Tahun 2024-2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir (2026)	Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A (>80-90)	A (80,57)	BB (76,70)	A (80,95)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (93)	A (88,563)	A (89,633)	A (92,841)
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	725 M	2.300.998.887.802	908.599.254.656	873.912.224.471

Sumber data : Evaluasi Renja Tahun 2022-2024, Renja Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

<p><b><u>Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP</u></b></p> <p>Realisasi Kinerja Tahun 2024 mencapai predikat A dengan skor <b>80,95</b>. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah RENSTRA dengan predikat A maka dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja RENSTRA sudah tercapai meskipun masih perlu peningkatan dari nilai skor yang dicapai.</p>	<p><b><u>Indeks Kepuasan Masyarakat</u></b></p> <p>Realisasi Kinerja Tahun 2024 mencapai predikat A dengan skor <b>92,841</b>. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah RENSTRA dengan predikat A maka dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja RENSTRA sudah tercapai meskipun masih perlu peningkatan dari nilai skor yang dicapai.</p>	<p><b><u>Nilai PMA/PMDN (Milvar)</u></b></p> <p>Realisasi Kinerja Tahun 2024 sebesar <b>873.912.224.471</b> jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah RENSTRA sebesar <b>725.000.000.000</b> sudah melebihi target jangka menengah RENSTRA akan tetapi capaian nilai investasi setiap tahun berjalan sangat tergantung dengan perolehan nilai investasi dari database aplikasi perizinan berusaha secara online (OSS) yang selalu mengalami perubahan.</p>
---	--	--

#### 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya serta dengan Kabupaten / Kota yang setara/sekitar

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target dan realisasi Standar pelayanan Minimal/Standar nasional sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten Kota yang setara/ sekitar**

NO	Indikator	Kabupaten / Kota	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai PMDN / PMA	Kabupaten Bone	350.000.000.000	873.912.224.471	250%
		Kabupaten Wajo	249.527.745.059	92.878.937.354	37%

**Sumber data :** Database OSS DPMPTSP Kab. Bone, Laporan Realisasi Investasi Kab. Wajo

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian tujuan/sasaran Nilai PMDN/PMA Kabupaten Bone senilai 873.912.224.471 dengan capaian sebesar 250% jika dibandingkan dengan Kabupaten Wajo senilai 92.878.937.354 dengan capaian sebesar 37%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian nilai PMDN Kabupaten Bone lebih tinggi dibanding Kabupaten Wajo.



## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel Ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata - rata capaian	Predikat			
				>110	90= $\leq$ s/d<110	60= $\leq$ s/d<90	<60
				Sangat berhasil	Berhasil	Cukup berhasil	Tidak berhasil
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	100%	116%		√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%			√		
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN (Milyar)	250%		√			

Sumber data : Evaluasi RENJA DPMPPTSP Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan / sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

### Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Realisasi kinerja untuk terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja DPMPPTSP Kabupaten Bone dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan dengan Skor 80.57 (A) menjadi 76.70 (BB), kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan skor menjadi 80.95 dengan predikat A.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena :

- Melaksanakan rapat evaluasi internal per Triwulan untuk memonitoring pencapaian target kinerja, mengukur realisasi capaian kinerja.
- Telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023

### Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2024 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 dengan Predikat A dan Skor 88.563, pada tahun 2023 predikat tetap A dan skor 89.633 dan pada tahun 2024 dengan skor 92.841

Laporan SKM DPMPTSP Tahun 2024 dapat diakses pada QR Code berikut :



LAPORAN  
SKM  
DPMPTSP  
2024

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena :

- Beroperasinya Mal Pelayanan Publik dengan gedung yang cukup luas untuk menampung banyak pengunjung / pemohon, didukung dengan fasilitas yang memberikan kenyamanan serta menyediakan sistem antrian secara elektronik. Hadirnya Mal Pelayanan Publik ini sebagai bentuk integrasi pelayanan terpadu. Berbagai jenis pelayanan terintegrasi dalam satu gedung, sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga masyarakat.
- Tersedianya layanan perizinan online antara lain :
  - a. Mal Pelayanan Publik Digital yang telah diresmikan untuk pendaftaran izin tenaga medis, sehingga pemohon yang berdomisili cukup jauh dari pusat kota, dapat mengakses dengan mudah.
  - b. Layanan aplikasi Sistem Informasi Perizinan secara elektronik (SIMPEL) memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan perizinan yang dapat diakses melalui website [www.dpmptspbone.go.id](http://www.dpmptspbone.go.id) dan dapat didownload melalui Play Store.
  - c. Sistem perizinan berusaha secara online (OSS-RBA) yang memudahkan pelaku

usaha untuk mendapatkan surat izin sekaligus menyediakan Klinik OSS pada salah satu tenant di Mal Pelayanan Publik untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang membutuhkan bantuan.

- d. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pengurusan izin bangunan juga dapat diakses secara online.

#### Nilai PMA/PMDN (Milyar)

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan drastis dari Rp. 2.300.998.887.802 pada tahun 2022 ke Rp. 908.599.254.656 pada tahun 2023. Kemudian kembali mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 873.912.224.471 pada tahun 2024, akan tetapi tetap melampaui target Rp. 350.000.000.000 untuk tahun 2024 dengan nilai capaian 250%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai PMA/PMDN disebabkan karena :

- Adanya kebijakan pemerintah melalui sistem perizinan berusaha secara online yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha.
- Adanya dukungan Pemerintah pusat melalui alokasi DAK NON FISIK untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha secara online (OSS) dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Tertibnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang didukung dengan pengalokasian anggaran DAK NON FISIK melalui pelaksanaan kegiatan seperti yang dapat diakses pada QR Code berikut :

**DAFTAR PELAKU  
USAHA BIMTEK  
TAHUN 2024**



#### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai Tujuan/Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sumber daya yang manusia, sarana dan



prasarana kantor dan anggaran dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

**Tabel 3.7**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e (d/c x 100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	A	100%	4.426.638.272	4.320.353.046	97.60%	2.4%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	100%	135.933.450	132.027.050	97.13%	2.8%
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/ PMDN (Milyar)	350 M	873.912.224.471	250%	751.055.500	619.430.016	82%	168%
				116%	5.313.627.222	5.071.810.112	95.45	20.55%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja sebagai berikut :

**Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Dengan capaian Kinerja sebesar 100 % dan capaian anggaran sebesar 97.60% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 2.4%

**Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Dengan capaian kinerja sebesar 250% dan capaian anggaran sebesar 97.13%, menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 2.8%

**Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Dengan capaian kinerja sebesar 250% dan capaian anggaran sebesar 82% menunjukkan efisiensi sumber daya sebesar 168%

Dari capaian tersebut kedua indikator mencapai 100% hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yakni Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan target BB dan realisasi A dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target A dan Realisasi A, sedangkan satu indikator lainnya yakni Nilai Investasi dengan Target 350.000.000.000 dengan realisasi 873.912.224.471.

#### 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis teradap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP		Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Indeks	BB	A	100%	Melaksanakan seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi dari APIP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Memberikan Reward dan Punishment bagi ASN berprestasi dan melakukan pelanggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian ASN dan Non ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (persen)	Persen	100	100	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	Dokumen	4	4	100%	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi ASN (laporan)	Laporan	14	14	100%	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (laporan)	Laporan	12	12	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	Laporan	12	12	300%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan nnnnnnnnnn penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	Laporan	12	12	33%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (laporan)	Laporan	12	12	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pembayaran Media Bahan Bacaan	Media	12	12	100%	
		Jumlah Laporan pembayaran Media yang Menayangkan Iklan	Media	12	12	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (laporan)	Laporan	240	163	103%	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pemeliharaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (laporan)	Laporan	1	1	100%	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	Melakukan pendataan dan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang urusan organisasi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (laporan)	Laporan	1	1	100%	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	Mengevaluasi kebutuhan pemenuhan jasa penunjang urusan organisasi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel (rekening)	Rekening	12	12	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	Laporan	61	61	100%	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	Melaksanakan dan mengevaluasi Barang Milik Daerah yang membutuhkan pemeliharaan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan (laporan)	Laporan	12	12	100%	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (laporan)	Laporan	12	12	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	Laporan	1	1	100%	
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	100%	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (persen)	Persen	80	80	100%	Meningkatkan mutu pelayanan publik
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Izin	4900	14559	297%	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2500	10098	403%	



	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	50	331	662%	Meningkatkan pelayanan konsultasi perizinan dan non perizinan
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten / kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kegiatan Usaha	2000	20	1%	Mengevaluasi hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan komitmen kepemilikan izin
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone		Nilai PMA/PMDN (Milyar)	Milyar	350.000.000.000	873.912.224.471	250%	Menciptakan iklim investasi melalui dengan melaksanakan peta potensi
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (persen)	Persen	21	250	1190%	Mengevaluasi implementasi PERDA Insentif/ Kemudahan berusaha bagi investor
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan (persen)	Persen	100	100	100%	

	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah / provinsi dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1	1	100%	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota</b>	<b>Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	Menyediakan Peta Potensi Investasi yang dapat diakses secara digital
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peraturan daerah rencana umum penanaman modal daerah kabupaten / kota	Dokumen	1	1	100%	Mengevaluasi pelaksanaan PERDA Rencana Umum Penanaman Modal
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten / kota	Dokumen	1	1	100%	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>1724%</b>	<b>2704%</b>	Melaksanakan Inovasi terkait promosi Potensi Penanaman Modal Kabupaten Bone melalui media online dan keikutsertaan dalam wadah IPRO / SSIC
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal (investor)	Investor	150	7431	4954%	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	Dokumen	6	6	100%	

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kab/kota	Dokumen	1	1	100%	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>86%</b>	Memaksimalkan penggunaan anggaran dalam memantau mengawasi dan membina pelaku usaha untuk taat terhadap ketentuan penanaman modal
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (persen)	Persen	85	56	66%	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	100	78	78%	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	240	240	100%	
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi	Kegiatan Usaha	100	104	104%	

		penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha					
--	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber data : Laporan Evaluasi RENJA Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

#### **Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Dengan target BB, capaian A atau sebesar 100% melebihi target. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Dengan target A, capaian A atau sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- a. Program Pelayanan Penanaman Modal

#### **Nilai PMA/PMDN**

Dengan target Rp. 350.000.000.000 dan realisasi Rp 873.912.224.471 indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

---

## UPAYA PERBAIKAN

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu :

### Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023

### Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- Memaksimalkan pelayanan melalui layanan Mal Pelayanan Publik Digital
- Pembinaan Aparat Pelayanan *Front Office* dalam memberikan layanan kepada masyarakat
- Peningkatan aplikasi perizinan yang dapat memudahkan masyarakat
- Penggunaan tanda tangan elektronik untuk mempercepat terbitnya izin dan seluruh layanan administrasi

### Nilai PMA/PMDN

- Mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif/kemudahan penanaman modal
- Menyiapkan peta potensi penanaman modal Kabupaten Bone dalam bentuk digital
- Mempromosikan potensi Kabupaten Bone yang telah dipetakan di platform online maupun tempat-tempat strategis

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 5.313.627.222 (*Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

URAIAN	JUMLAH		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Penanaman Modal yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Rp 4.426.638272	Rp 4.320.353.046	97.6%
Sasaran 1 : Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Rp 4.426.638272	Rp 4.320.353.046	97.6%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.426.638272	Rp 4.320.353.046	97.6%
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Penanaman Modal yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Rp 135.933.450	Rp 132.027.050	97.1%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Rp 135.933.450	Rp 132.027.050	97.1%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 135.933.450	Rp 132.027.050	97.1%
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Penanaman Modal yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Rp 751.055.500	Rp 619.430.016	82.5%
Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Rp 751.055.500	Rp 619.430.016	82.5%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 22.291.500	Rp 19.868.900	89.1%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 136.034.000	Rp 134.990.116	99.2%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 592.730.000	Rp 464.571.000	78.38%
	Rp 5.313.627.222	Rp 5.071.810.112	95.4%

Sumber Data : Realisasi Anggaran DPMPTSP

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2024 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik APBD Kabupaten Bone T.A. 2024. Nilai pagu anggaran tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN UMUM

Nilai rata rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebesar 116% dengan kategori pencapaian kinerja sangat tercapai / sangat berhasil, dengan capaian kinerja per indikator kinerja utama adalah

##### **Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 100% dari target BB dan realisasi A.

##### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 100% dari target A dan realisasi A.

##### **Nilai PMA/PMDN**

Capaian Kinerja pada tahun 2024 sebesar 250% dari target 350.000.000.0000 dan realisasi sebesar 873.912.224.471

Hal ini menggambarkan bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

LKj bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

---

Pintu pada tahun 2024 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator yang memenuhi kriteria tinggi dan 1 indikator lainnya termasuk kriteria sangat tinggi.

## **B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI**

### **1. Kendala**

Meskipun nilai rata rata capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 sebagaimana yang telah diuraikan di atas namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan, dalam hal ini :

- Masih sering terjadi kendala atau gangguan pada bagian server aplikasi pelayanan atau pada jaringan internet.

### **2. Upaya mengatasi**

- Memprioritaskan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung layanan perizinan dan non perizinan. Untuk tahun 2024, dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.